ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun lingkup internasional yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (transnational *crime*). Jadi tidak hanya di Indonesia saja, namun pelaku merupakan sindikat internasional. Dalam dunia medis atau dunia kesehatan, narkotika sangat di butuhkan untuk kepentingan pengobatan, namun disisi lain narkotika juga di edarkan secara bebas dan tanpa izin dan sering di salahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap penyalagunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati (Putusan Nomor 131/ Pid.Sus/2006/PN Pati) (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Pidana di Pengadilan Negeri Pati (Putusan Nomor 131/ Pid.Sus/2006/PN Pati) dan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam ilmu hukum dan dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya, melaui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data penelitian tidak sekedar berpedoman pada kentetuan normatif saja, melainkan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial, yaitu dengan menerapkan teori-teori.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan oleh faktor yang dijadikan dasar untuk pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yang meringankan dan memberatkan, yang ada pada pertimbangan diatas, seperti terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang apa yang dilakukan dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Dalam proses pemberian sanksi pidana, peranan hakim sangat menentukan. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yakni pertimbangan mengenai faktanya yang terjadi (apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya) dan pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa dirasa bersalah, sehingga mndapat dijatuhi pidana). Proses penjatuhan pidana tersebut berakhir dengan ditetapkannya jenis-jenis pidana yang tepat, beratnya dan cara pelaksanaan yang ditetapkan, dalam kasus ini menurut penulis adalah hakim memberikan pidana penjara dan rehabilitasi terhadap terdakwa.

Kata kunci : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

ABSTRACT

Laws and regulations in Indonesia as well as the scope of the international support efforts for the eradication of criminal acts of narcotics is very necessary, the crime of narcotics is one form of unconventional crime conducted systematically, using the modus operandi of high and advanced technology, as well as done in organized (organized crime) and already are transnational (transnational crime). So not only in Indonesia, but the perpetrator is syndicated internationally. In the medical world or the world of health, narcotics very in need for the benefit of the treatment, but on the other hand of narcotics also in miss out freely and without permission and often in use by persons-persons who are not responsible.

As for the formulation of the problem of this thesis are (1) How consideration of the judge in a criminal light weight dropping against the abusive Narcotics on the State Court of starch (Ruling number 131/Pid. Sus/2006/PN starch) (2) what are the constraints facing the judge in Criminal District Court dropped the starch (Ruling number 131/Pid. Sus/2006/PN starch) and in the study authors use normative juridical approach method , i.e., the approach in the science of law and using the help of other social sciences, via this approach means in the study of research data is not merely based on the normative provisions only, but rather by making use of the social sciences, namely by applying the theories.

Based on the discussion generated by factors that made the basis for the consideration of the judge in taking decisions that lighten and damning, in consideration of the above, like the defendant be polite in court, admitting frankly what is done and regretted the deed was done. In the process of criminal sanctions, the role of a judge is very decisive. There are two things that should be considered by the judge, namely consideration regarding the fact that occurs (whether the defendant actually did the deed in the claims by him) and consideration of the law (if the Act of the defendant is a criminal offence and the defendant proved guilty, so it has imposed a criminal). The overthrow of the criminal proceedings ended with the establishment of criminal types, severity and how implementation-defined, in this case according to the author is the judge gave prison and rehabilitation against criminal defendants.

Keywords: Act No. 35 of 2009 about narcotics